

RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PROV. KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 19 April 2021

Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK RI



BAHTIAR UJANG PURNAMA

Brigadir Jenderal Polisi

Direktorat III Koordinasi dan Supervisi KPK RI terdiri dari 4 (empat) Satuan Tugas (satgas) yaitu 2 (dua) Satgas Penindakan dan 2 (dua) Satgas Pencegahan. Dengan wilayah sebagai berikut:

SATGAS PENINDAKAN WILAYAH 1

Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Selatan, Mabes Polri

SATGAS PENINDAKAN WILAYAH 2

Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Mabes Polri

SATGAS PENCEGAHAN WILAYAH 1

Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Selatan

SATGAS PENCEGAHAN WILAYAH 2

Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur

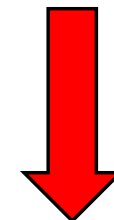
INDONESIA CPI 2020 & 2019



Highlight Indikator bagi Indonesia

Ekonomi
&
Investasi

Politik
&
Demokrasi



Penegakan
Hukum

INDONESIA SOURCE DATA 2020

	2020		2019
PRS International Country Risk Guide	50	↓	58
IMD World Competitiveness Yearbook	43	↓	48
Global Insight Country Risk Ratings	35	↓	47
World Economic Forum EOS	46	←	46
Bertelsmann Foundation Transform Index	37	←	37
Economist Intelligence Unit Country Ratings	37	←	37
PERC Asia Risk Guide	32	↓	35
Varieties of Democracy Project	26	↓	28
World Justice Project – Rule of Law Index	23	↑	21

ASEAN CPI 2020



SIMILAR SCORE AND RANK

Score

37



Indonesia



Gambia

Rank	CPI 2020	Country	CPI 2019	
3	85	Singapore	85	→
35	60	Brunei Darussalam	60	→
57	51	Malaysia	53	↓
86	40	Timor Leste	38	↑
102	37	Indonesia	40	↓
104	36	Vietnam	37	↓
104	36	Thailand	36	→
115	34	Philippines	34	→
134	29	Laos	29	→
137	28	Myanmar	29	↓
160	21	Cambodia	20	↑



Highly Corrupt

No Data

TUGAS dan FUNGSI KPK

Pasal 6 UU No 19 Tahun 2019



Pencegahan (Ps. 7)

Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.



Supervisi (Ps. 10)

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.



Koordinasi (Ps. 8)

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.



Penindakan (Ps. 11-12ABCD)

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.



Eksekusi (Ps. 13)

Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Monitor (Ps. 9)

Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah .





FOKUS AREA **KPK**



Korupsi Terkait Bisnis



Korupsi Terkait Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi



Korupsi Terkait Politik



Korupsi Terkait Pelayanan Publik



Korupsi Terkait Sumber Daya Alam

**SE Pimpinan KPK No. 8
Tahun 2021 tentang
Pencegahan Korupsi
Terkait Proses
Perencanaan dan
Penganggaran APBD
Tahun Anggaran 2022
dan APBD-P 2021**



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia
2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 8 Tahun 2021

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi;
4. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
5. KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2022 dan APBD Perubahan TA 2021, serta akan mengambil langkah-langkah kongkrit, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk koordinasi pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran APBD, silakan menghubungi Tim Koordinasi dan Supervisi wilayah yang telah ditunjuk. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2021



Pimpinan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

[Signature]
Fidri Bahuri
Ketua

UU 31/1999 juncto UU 20/2001

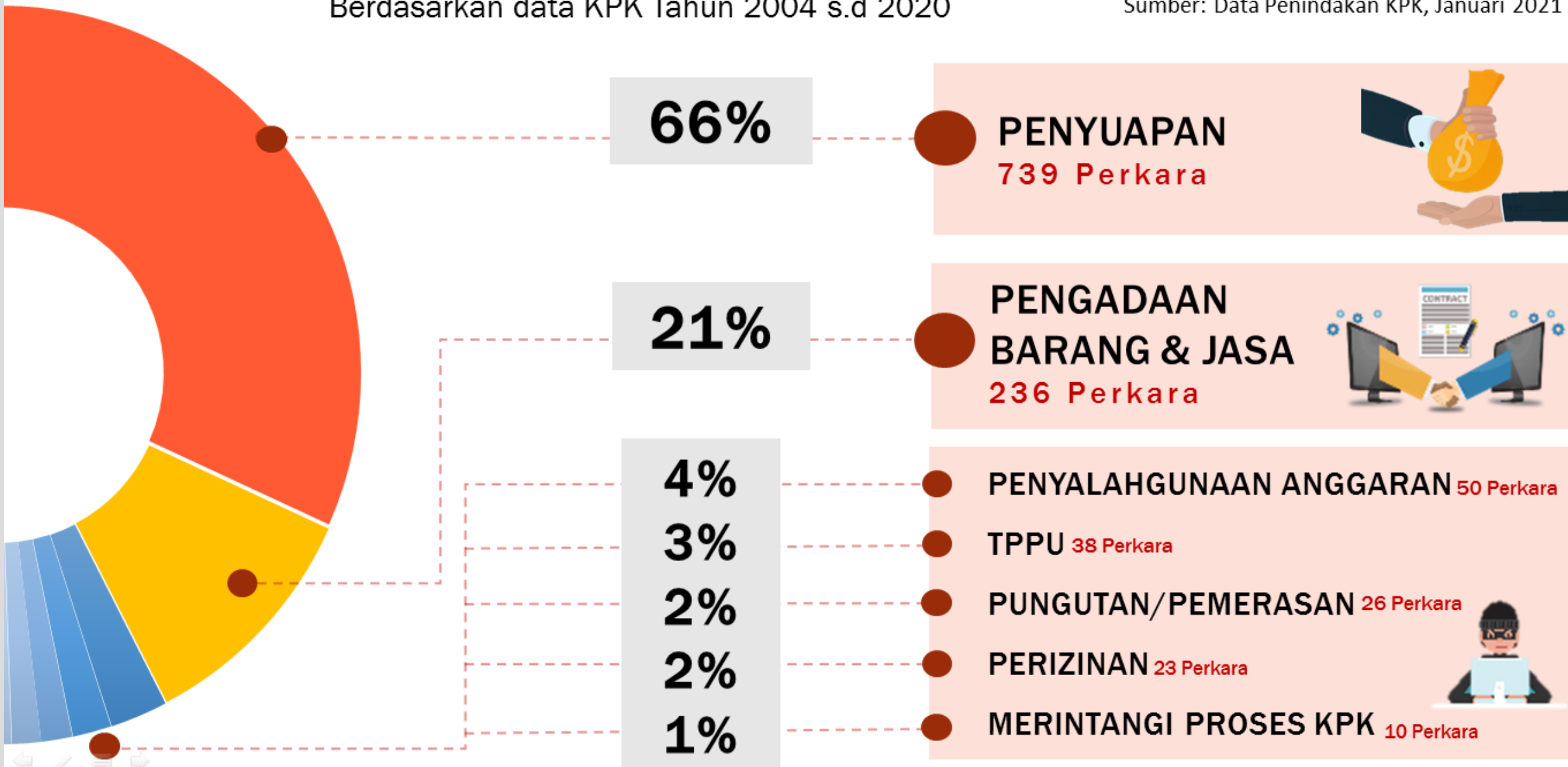
Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:



JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2020

Sumber: Data Penindakan KPK, Januari 2021



Jabatan Tersangka Korupsi

2004 - 2020

Sumber: Data Penindakan KPK, Januari 2021

DPR/DPRD

274

Es.I/II/III

230

Walikota/
Bupati &
Wakilnya
122

Hakim

22

Pengacara

12

Jaksa

10

Korporasi

6

Swasta
308

Lainnya

157

Menteri/
Kepala K/L
28

Gubernur

21

Komisioner

7

Dubes

4

Polisi

2



Daftar Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi Tahun 2007 – 2020



1. Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

sumber: acch.kpk.go.id



119 Kepala Daerah Terciduk KPK, 9 Diantaranya dari Kalimantan

Diterbitkan 2 tahun yang lalu pada 9 Oktober 2019
Diunggah oleh **Desy Arfianty**



KPK menangkap 119 kepala daerah karena kasus korupsi Foti

Berbagai Dugaan Korupsi di Kalsel 'Dibawa' ke KPK

Baritopost.Co.Id - Baritopost Online, Hukum & Kriminal - 2.106 Views



KETUA LSM KAKI HA Husaini saat beresasi dan Ketua Pemuda Islam Kalsel HM Hasan saat menyerahkan dokumen laporan dugaan korupsi kepada petugas KPK (foto ist)

dotikNews > Berita

KPK Geledah PT Jhonlin Milik Haji Isam di Kalsel Terkait Kasus Suap Ditjen Pajak

Luqman Nurhadi Arunanta - dotikNews

Kamis, 18 Mar 2021 21:49 WIB

61 komentar

SHARE f t



Ali Fikri (Ani Saputra/detikcom)

Bupati HST Kalsel: Pernah Dibui Karena Korupsi, Kini Tersangka KPK

Andhika Prasetta - dotikNews

Sabtu, 06 Jan 2018 08:31 WIB

61 komentar

SHARE f t



Bupati HST, Kalsel, ditahan KPK. (Yusgga Sancaya/detikcom)

Bekas Gubernur Kalimantan Selatan Sudah Lima Kali Diperiksa

Oleh : **Tempo.co**

Kamis, 21 Desember 2006 00:12 WIB

KOMENTAR

TEMPO Interaktif, Banjarmasin:Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Dr. H. Sjahrudin Rasul, menyatakan komisinya telah memiliki bukti akurat ketika akan menetapkan seseorang menjadi tersangka."Jika penyidik KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka sehingga kasusnya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, hal itu setelah memiliki bukti akurat dan lengkap," ujarnya di Banjarmasin, kemarin.Pernyataan Wakil Ketua KPK tersebut disampaikan se usai pembukaan bimbingan teknis kesadaran antikorupsi di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.Sjahrudin menanggapi ditetapkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Sjachriel

Titik Rawan Korupsi di Pemerintah Daerah



Area Intervensi Koordinasi dan Supervisi KPK



CAPAIAN MCP 2020

Nasional	Kelimantan Selatan	PEMERINTAH DAERAH	Total	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD	PENGADAAN BARANG DAN JASA	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KAPABILITAS APIP	MANAJEMEN ASN	OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	MANAJEMEN ASET DAERAH	DANA DESA
34	1	Kabupaten Banjar	88,14	93.50	76.45	83.30	92.06	94.00	81.20	96.85	88.70
51	2	Kota Banjarmasin	86,12	93.00	84.38	92.64	89.00	85.00	73.41	85.10	
57	3	Kabupaten Tapin	85,48	97.00	83.12	93.00	77.50	93.50	60.70	82.90	90.00
101	4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	80,73	100.00	82.99	85.60	70.56	92.00	57.73	57.80	90.00
115	5	Kota Banjarbaru	79,75	95.50	85.57	93.75	84.56	87.30	50.93	51.10	
118	6	Provinsi Kalimantan Selatan	79,58	79.74	85.65	92.65	84.00	88.60	41.20	88.00	
166	7	Kabupaten Balangan	76,64	86.00	76.58	93.50	67.54	79.20	79.48	38.64	88.00
178	8	Kabupaten Tabalong	75,89	75.25	80.60	100.00	49.58	83.30	62.85	71.30	83.25
205	9	Kabupaten Barito Kuala	73,33	94.30	37.46	92.72	64.60	93.40	34.97	79.60	90.00
237	10	Kabupaten Tanah Bumbu	71,19	90.50	83.81	55.46	74.12	70.25	42.97	65.05	85.35
263	11	Kabupaten Tanah Laut	68,16	69.75	75.46	77.53	49.38	80.70	43.41	79.00	60.00
273	12	Kabupaten Hulu Sungai Utara	67,43	79.00	44.88	86.88	69.92	72.35	54.01	45.70	90.00
279	13	Kabupaten Kotabaru	66,87	53.00	62.19	67.40	83.78	77.92	63.10	53.82	70.60
353	14	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	60,2	78.00	90.61	65.05	27.00	66.55	41.82	36.90	65.00

Sumber : <https://jaga.id>

CAPAIAN REALISASI PAJAK DAERAH

PEMERINTAH DAERAH	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Nilai (Rp)	Presentase
Provinsi Kalimantan Selatan	2,765,917,279,023	2,211,704,923,962	(554,212,355,061)	-25.06%
Kabupaten Balangan	13,420,168,379	13,378,574,067	(41,594,312)	-0.31%
Kabupaten Banjar	80,831,827,543	76,877,554,288	(3,954,273,255)	-5.14%
Kabupaten Barito Kuala	32,397,336,901	23,083,486,102	(9,313,850,799)	-40.35%
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	14,461,412,734	12,018,222,450	(2,443,190,284)	-20.33%
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	13,567,359,199	11,114,134,813	(2,453,224,386)	-22.07%
Kabupaten Hulu Sungai Utara	12,295,480,512	10,887,026,124	(1,408,454,388)	-12.94%
Kabupaten Kotabaru	62,536,670,348	59,634,455,037	(2,902,215,311)	-4.87%
Kabupaten Tabalong	74,128,140,750	72,787,987,468	(1,340,153,282)	-1.84%
Kabupaten Tanah Bumbu	64,034,598,638	57,630,186,627	(6,404,412,011)	-11.11%
Kabupaten Tanah Laut	46,938,986,026	44,905,207,261	(2,033,778,765)	-4.53%
Kabupaten Tapin	41,925,990,212	17,199,878,574	(24,726,111,639)	-143.76%
Kota Banjarbaru	142,129,815,903	116,088,790,787	(26,041,025,116)	-22.43%
Kota Banjarmasin	215,643,985,953	168,139,922,672	(47,504,063,281)	-28.25%

PROGRAM OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH

Mendorong Pemda memiliki regulasi terkait dengan optimalisasi pajak daerah

Mendorong Pemda memiliki aplikasi penatausahaan dan pengelolaan pajak daerah

Mendorong kerjasama Pemda dengan Badan Pertanahan Nasional

Mendorong kerjasama Pemda dengan Bank Kalsel

Mendorong penagihan piutang pajak daerah

Pengadaan Barang dan Jasa

No	Pemerintah Daerah	2019					2020					Kenaikan/ Penurunan	
		Pengadaan Langsung		Lelang		Anggaran	Pengadaan Langsung		Lelang		Anggaran		
		Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Belanja Langsung	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	%
1	Kabupaten Banjar	10,456	389,354	254	298,629	957	6,552	165,710	185	156,770	671	- 286	-30%
2	Kota Banjarmasin	10,033	718,496	251	427,314	1,162	9,836	670,611	239	383,587	989	- 173	-15%
3	Kabupaten Tapin	1,877	101,485	169	227,267	451	3,739	122,145	205	449,383	15	- 436	-97%
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,217	191,231	179	307,049	470	5,821	282,493	192	210,745	-	- 470	-100%
5	Kota Banjarbaru	5,826	375,764	222	281,930	766	5,331	307,622	139	179,327	707	- 59	-8%
6	Provinsi Kalimantan Selatan	9,286	1,364,774	716	1,757,503	3,844	13,558	1,162,526	667	1,382,778	2,838	- 1,006	-26%
7	Kabupaten Balangan	7,917	363,911	180	195,370	831	9,583	438,564	163	197,766	572	- 259	-31%
8	Kabupaten Tabalong	5,958	253,564	287	376,116	962	8,954	350,458	230	267,602	749	- 213	-22%
9	Kabupaten Barito Kuala	933	66,961	186	208,635	-	2,078	136,808	130	202,160	-	- -	-
10	Kabupaten Tanah Bumbu	5,089	788,005	210	355,581	1,018	5,416	720,294	168	332,488	1,118	100	10%
11	Kabupaten Tanah Laut	7,208	507,944	281	299,455	687	9,107	478,168	276	349,724	-	- 687	-100%
12	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,476	603,277	124	183,780	436	2,301	87,209	141	257,350	-	- 436	-100%
13	Kabupaten Kotabaru	3,181	504,885	120	363,157	1,042	2,436	377,035	88	170,684	787	- 255	-24%
14	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5,158	310,287	189	245,226	-	4,979	323,110	73	89,813	-	- -	-

(dalam miliar Rupiah)

sumber : monev.lkpp.go.id

Serah Terima Fasos/Fasum 2020

No	Pemerintah Daerah	Fasus/Fasom			
		2020		2021	
		Unit	Nilai (Rp)	Belum Diserahkan	Target 2021
1	Kabupaten Banjar			442	21
2	Kota Banjarmasin			178	10
3	Kabupaten Tapin			37	5
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan			33	4
5	Kota Banjarbaru			-	10
6	Provinsi Kalimantan Selatan				
7	Kabupaten Balangan				
8	Kabupaten Tabalong				
9	Kabupaten Barito Kuala			116	20
10	Kabupaten Tanah Bumbu	19	1.805.449.860	7	5
11	Kabupaten Tanah Laut			74	6
12	Kabupaten Hulu Sungai Utara				
13	Kabupaten Kotabaru			23	5
14	Kabupaten Hulu Sungai Tengah				

KEPATUHAN LHKPN 2021



Rumpun Eksekutif

Data per 12 April 2021 (23.59 WIB)

Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN	107	99	8	92,52%
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR	173	173	0	100,00%
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA	139	108	31	77,70%
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	185	185	0	100,00%
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	101	57	44	56,44%
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	120	33	87	27,50%
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU	274	219	55	79,93%
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG	182	182	0	100,00%
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU	203	203	0	100,00%
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT	187	187	0	100,00%
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN	171	171	0	100,00%
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU	264	264	0	100,00%
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	210	209	1	99,52%
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	228	154	74	67,54%
TOTAL	2544	2244	300	88%

KEPATUHAN LHKPN 2021



Rumpun Legislatif

Data per 12 April 2021 (23.59 WIB)

Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
DPRD KABUPATEN BALANGAN	24	24	0	100,00%
DPRD KABUPATEN BANJAR	45	45	0	100,00%
DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	35	29	6	82,86%
DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	30	30	0	100,00%
DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	30	28	2	93,33%
DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	30	30	0	100,00%
DPRD KABUPATEN KOTABARU	35	21	14	60,00%
DPRD KABUPATEN TABALONG	30	30	0	100,00%
DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU	34	34	0	100,00%
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT	35	34	1	97,14%
DPRD KABUPATEN TAPIN	24	24	0	100,00%
DPRD KOTA BANJARBARU	30	27	3	90,00%
DPRD KOTA BANJARMASIN	45	45	0	100,00%
DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	55	51	4	92,73%
TOTAL	482	452	30	94%

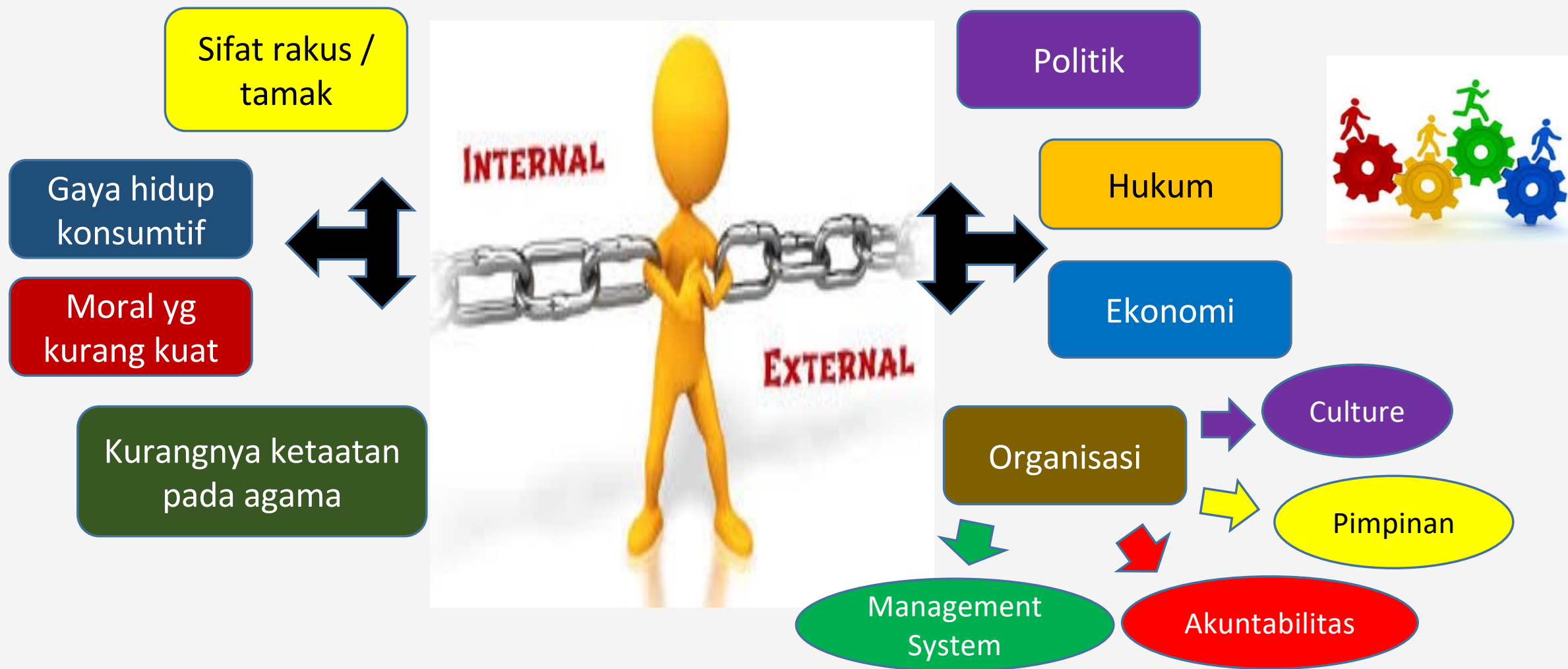
KOORDINASI & SUPERVISI

APIP

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Deteksi dan Edukasi



- 1) Identifikasi/Pemetaan
- 2) Review, evaluasi, monitoring, inspeksi rutin
- 3) Penguatan moral, etika, perilaku, komitmen, integritas



Pencegahan



Perbaikan sistem, pengawasan melekat, evaluasi rutin



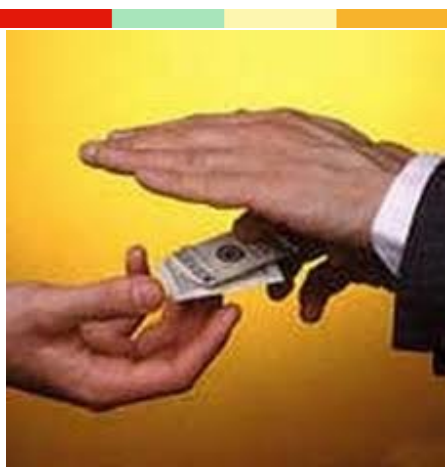
Penegakan hukum



Penguatan penegakan hukum yang konsisten dan obyektif

**MENJADI KEPALA DAERAH APAKAH
SEBUAH NIAT SUCI PENGABDIAN
ATAU SEBUAH PROFESI PEKERJA?**





**TANPA KORUPSI BUKAN BERARTI
ANDA TIDAK AKAN SUKSES**

**SUKSES TANPA KORUPSI ADALAH
MEMENUHI TAKDIR TUHAN**





TERIMA KASIH
